



**BUPATIGARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 113 TAHUN 2019**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Garut dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH TAHUN 2019-2024.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Garut ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati Garut dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Garut.
6. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
9. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi.
10. Unit Kerja Mandiri adalah unit organisasi di lingkungan PD yang memiliki dan mengelola sumber daya berupa sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

- a. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.
- b. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing PD dan unit kerja mandiri di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) PD dan Unit Kerja Mandiri melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian Indikator Kinerja Utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.
- (3) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala PD dan Unit Kerja Mandiri serta disampaikan kepada Bupati melalui BAPPEDA.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Dalam hal Indikator Kinerja Utama menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja PD secara keseluruhan, Kepala PD melaporkan kepada Bupati melalui BAPPEDA agar ditentukan pengembangan lebih lanjut.

Pasal 6

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama, Bupati menugaskan Inspektorat untuk:

- a. melaksanakan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja PD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. memantau kemajuan pencapaian kinerja dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan penerapan manajemen kinerja pada PD di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 23 - 8 - 2019**

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 23 - 8 - 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

DENISUHERLAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2019 NOMOR 113**

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GARUT
 NOMOR 113 TAHUN 2019
 TANGGAL 23 - 8 - 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2019 - 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN INDIKATOR	SKPD PENANGGUNG JAWAB
MISI 1 : Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya.					
1.	meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	indeks kesalehan sosial masyarakat	kategori	<p>hasil survei indeks kesalihan sosial dengan kategori baik (skor>60) dan kurang (skor<60). Ditetapkan dengan 10 (sepuluh) Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memberi; 2. peduli; 3. menghargai perbedaan nilai-nilai kehidupan; 4. tidak memaksakan nilai; 5. tidak menghina atau merusak nilai yang berbeda; 6. keterlibatan dalam demokrasi; 7. Keterlibatan dalam perbaikan kinerja pemerintahan (Good governance); 8. mencegah kekerasan, 9. konservasi lingkungan, dan 10. restorasi lingkungan. <p>Sumber: kajian indeks kesalehan masyarakat – KEMENAG</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Daerah • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Satuan Polisi Pamong Praja • Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	meningkatkan harapan hidup masyarakat	angka harapan hidup	tahun	<p>rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat dijalani oleh seseorang hingga akhir hayatnya. Sumber Data BPS</p>	Dinas Kesehatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
3.	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Persentase UCI	%	Jumlah Desa yang tercapai UCI dibagi jumlah semua desa x 100 %	Dinas Kesehatan
4.	Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat	Persentase Desa siaga aktif	%	Jumlah Desa Siaga yang aktif dibandingkan dengan jumlah Desa Siaga yang dibentuk x 100 %	Dinas Kesehatan
5.	Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan	a. Jumlah Status puskesmas TTP menjadi DTP b. Jumlah Status pustu menjadi puskesmas	jumlah jumlah	Jumlah Puskesmas Tanpa Tempat Perawatan yang berubah status menjadi Puskesmas Dengan Tempat Jumlah Puskesmas Pembantu yang berubah status menjadi puskesmas tanpa perawatan	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
6.	Meningkatnya prosentase pelayanan kefarmasian	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	Jumlah obat yang terpenuhi dibagi jumlah obat sesuai standar x 100 %	Dinas Kesehatan
7.	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat	Nilai IKM di puskesmas dan Dinas Kesehatan	angka	Hasil rekapitulasi quisioner tentang pelayanan publik	Dinas Kesehatan
8.	Meningkatnya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia kesehatan	Persentase SDMK yang memiliki ijin praktek	%	Jumlah SDMK yang memiliki ijin praktek di bagi dengan jumlah sasaran semua tenaga kesehatan x 100 %	Dinas Kesehatan
9.	Meningkatnya Jumlah Puskesmas Terakreditasi	Status puskesmas terakreditasi -Dasar 4 /5,9% -Madya 5 /7,46%	jumlah	Hasil penilaian tim Surveryor yang dibuktikan dengan pemberian sertifikat akreditasi	Dinas Kesehatan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN INDIKATOR	SKPD PENANGGUNG JAWAB										
5.	meningkatkan jumlah penduduk pengendalian	laju pertumbuhan penduduk	%	(jumlah penduduk tahun perhitungan dikurangi jumlah penduduk tahun sebelumnya) dibagi jumlah penduduk tahun sebelumnya) x 100%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
MISI 2 : Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola Pemerintahan daerah yang baik dan bersih															
6.	meningkatkan pelayanan publik yang profesional dan amanah	indeks kepuasan masyarakat	kategori	<p>IKM= $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}}$</p> <p>Dimana:</p> <p>Bobot nilai rata-rata tertimbang= $\frac{\text{Jumlah bobot}}{1} = 0,071$</p> <p>Jumlah unsur 14</p> <p>untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM Unit Pelayanan x 25</p> <table><tr><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th></tr><tr><td>1,00 - 1,75</td><td>25,00 - 43,75</td></tr><tr><td>1,76 - 2,50</td><td>43,76 - 62,50</td></tr><tr><td>2,51 - 3,25</td><td>62,51 - 81,25</td></tr><tr><td>3,26 - 4,00</td><td>81,26 - 100,00</td></tr></table> <p>Sumber: PERMENDAGRI 86 Tahun 2017</p>	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	1,00 - 1,75	25,00 - 43,75	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	<ul style="list-style-type: none">Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDinas Penanaman Modal dan Perizinan TerpaduRSUD dr. Slamet Garut
Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM														
1,00 - 1,75	25,00 - 43,75														
1,76 - 2,50	43,76 - 62,50														
2,51 - 3,25	62,51 - 81,25														
3,26 - 4,00	81,26 - 100,00														
7.	meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	a. Opini BPK	kategori	opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none">Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahInspektorat Daerah										

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN INDIKATOR	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		b. nilai evaluasi SAKIP	kategori	predikat penilaian SAKIP Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Inspektorat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah
		c. nilai evaluasi LPPD	kategori	predikat penilaian LPPD Kabupaten	Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah
MISI 3 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan Serta Kemantapan Infrastruktur Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Serta Fungsi Ruang					
8.	meningkatkan Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian	persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	(panjang Jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang dibagi total panjang jalan kabupaten) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9.	meningkatkan kemajuan pembangunan desa	persentase desa mandiri, maju dan berkembang	%	(Jumlah desa mandiri, maju dan berkembang dibagi jumlah total desa di kabupaten Garut) x 100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.	meningkatkan pemenuhan akses layanan sumber air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan	a. persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan b. persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	%	(Jumlah jiwa yang terlayani air minum dibagi jumlah penduduk) x 100% (Jumlah rumah tangga yang terlayani sanitasi dibagi Jumlah total rumah tangga) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11.	meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pemukiman	luas area lingkungan permukiman kumuh jumlah rumah tidak layak huni	Ha unit	Luas Area Kumuh pada Tahun N Jumlah rumah tidak layak huni dalam satu tahun tertentu	Dinas Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN INDIKATOR	SKPD PENANGGUNG JAWAB
12.	meningkatkan pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir	a. persentase irigasi dalam kondisi baik b. tingkat Pengurangan Terdampak Banjir	% Titik	(Luas areal yang terlayani irigasi teknis dibagi Total Luas areal yang terlayani irigasi teknis) x 100% (jumlah titik rawan banjir saat ini dibagi jumlah titik rawan banjir) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13.	meningkatkan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	Mencerminkan Kondisi Kualitas Air, Udara dan Lahan Dengan Rumus IKLH = $(IPA \times 30\%) + (IPU \times 30\%) + (ITH \times 40\%)$ Catatan : IPA = Indeks Pencemaran Air IPU = Indeks Pencemaran Udara ITH = Indeks Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup
14.	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	Poin	$Risiko = \frac{Ancaman \times Kerentanan}{Kapasitas}$ Keterangan : Risiko = Potensi Kerugian Ancaman = Potensi bencana Kerentanan = Kesiapan menghadapi bahaya bencana Kapasitas = Aset, sumber daya, kekuatan dan keterampilan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MISI 4 : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal dan Industri Pertanian Serta Pariwisata yang Berdaya Saing Disertai Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan					
15.	Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	$PPH = \% \text{ Angka Kekucupan Gizi (AKG)} \times \text{ bobot masing-masing kelompok pangan}$ Sumber: PERMENDAGRI 86 Tahun 2017	Dinas Ketahanan Pangan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN INDIKATOR	SKPD PENANGGUNG JAWAB
16.	meningkatkan pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	PDRB Per Kapita	juta Rp	Jumlah PDRB atas Dasar Harga Berlaku/Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun. Sumber Data: BPS RI	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Pariwisata dan Kebudayaan• Dinas Koperasi dan UKM• Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral• Dinas Perikanan dan peternakan• Dinas Pertanian
17.	meningkatkan realisasi investasi daerah	Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	triliun Rp.	Jumlah Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Sumber: PERMENDAGRI 86 Tahun 2017	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GARUT
 NOMOR 113 TAHUN 2019
 TANGGAL 23 - 8 - 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
A. DINAS PENDIDIKAN					
1.	meningkatkan pemerataan akses pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar	a. angka partisipasi kasar PAUD	%	$\frac{\text{(Jumlah Siswa)}}{\text{(Jumlah Penduduk Usia 2-6 tahun)}} \times 100\%$	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas)
		b. angka partisipasi murni SD	%	$\frac{\text{(Jumlah Siswa usia 7 - 12 tahun)}}{\text{(Jumlah Penduduk Usia 7-12 tahun)}} \times 100\%$	Bidang Sekolah Dasar (SD)
		c. angka partisipasi murni SMP	%	$\frac{\text{(Jumlah Siswa usia 13-15 tahun)}}{\text{(Jumlah Penduduk Usia 13-15 tahun)}} \times 100\%$	Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP)
2.	meningkatkan penduduk usia 25 tahun ke atas yang menuntaskan pendidikannya hingga setara SMA	Penurunan penduduk usia 25 tahun ke atas yang belum menuntaskan pendidikan hingga setara SMA	%	$\frac{\text{(Jumlah lulusan pendidikan kesetaraan paket C tahun berjalan)}}{\text{(Jumlah Penduduk belum menuntaskan pendidikan hingga setara SMA Usia 25 Tahun ke atas)}} \times 100\%$	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas)
3.	meningkatkan mutu pendidikan	a. persentase PAUD terakreditasi minimal B	%	$\frac{\text{(Jumlah PAUD terakreditasi minimal B)}}{\text{(Jumlah PAUD)}} \times 100\%$	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas)
		b. rata-rata Nilai Ujian SD	Angka	$\frac{\text{(Jumlah Nilai Ujian)}}{\text{(Jumlah Peserta Ujian)}} \times 100\%$	Bidang Sekolah Dasar (SD)
		c. rata-rata Nilai Ujian SMP	Angka	$\frac{\text{(Jumlah Nilai Ujian)}}{\text{(Jumlah Peserta Ujian)}} \times 100\%$	Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP)
		d. persentase Lembaga Pendidikan Masyarakat terakreditasi Minimal B	%	$\frac{\text{(Jumlah Lembaga terakreditasi minimal B)}}{\text{(Jumlah Lembaga)}} \times 100\%$	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
4.	Meningkatnya mutu tenaga pendidik dan kependidikan	a. persentase guru yang bersertifikat pendidik	%	(Jumlah guru yang bersertifikasi)/(Jumlah guru) x 100%	Bidang Data dan Ketenagaan
		b. persentase kepala sekolah yang bersertifikat	%	(Jumlah kepala sekolah yang bersertifikasi)/(Jumlah kepala sekolah) x 100%	Bidang Data dan Ketenagaan
		c. persentase pengawas yang bersertifikat	%	(Jumlah pengawas yang bersertifikasi)/(Jumlah pengawas) x 100%	Bidang Data dan Ketenagaan
B. DINAS KESEHATAN					
1.	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada ibu, bayi, balita dan kelompok masyarakat beresiko	a. Persentase Pelayanan kesehatan pada ibu hamil	%	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di Fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta dibagi jumlah semua ibu hamil (sasaran) x 100 %	Dinas Kesehatan
		b. Persentase Pelayanan kesehatan pada ibu bersalin dan fasilitas kesehatan	%	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan dibagi jumlah semua ibu bersalin (sasaran) x 100 %	Dinas Kesehatan
		c. Persentase Pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir	%	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dibagi jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota kali 100 %	Dinas Kesehatan
		d. Persentase pelayanan kesehatan pada gizi buruk	%	Jumlah balita gizi buruk dibagi dengan jumlah balita seluruhnya x 100 %	Dinas Kesehatan
2.	Meningkatnya penyehatan lingkungan	Persentase Jumlah Desa ODF	%	Jumlah Desa yang ODF dibagi dengan jumlah semua desa x 100 %	Dinas Kesehatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
3.	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Persentase UCI	%	Jumlah Desa yang tercapai UCI dibagi jumlah semua desa x 100 %	Dinas Kesehatan
4.	Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat	Persentase Desa siaga aktif	%	Jumlah Desa Siaga yang aktif dibandingkan dengan jumlah Desa Siaga yang dibentuk x 100 %	Dinas Kesehatan
5.	Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan	a. Jumlah Status puskesmas TTP menjadi DTP b. Jumlah Status pustu menjadi puskesmas	jumlah jumlah	Jumlah Puskesmas Tanpa Tempat Perawatan yang berubah status menjadi Puskesmas Dengan Tempat Jumlah Puskesmas Pembantu yang berubah status menjadi puskesmas tanpa perawatan	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
6.	Meningkatnya prosentase pelayanan kefarmasian	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	Jumlah obat yang terpenuhi dibagi jumlah obat sesuai standar x 100 %	Dinas Kesehatan
7.	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat	Nilai IKM di puskesmas dan Dinas Kesehatan	angka	Hasil rekapitulasi quisioner tentang pelayanan publik	Dinas Kesehatan
8.	Meningkatnya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia kesehatan	Persentase SDMK yang memiliki ijin praktek	%	Jumlah SDMK yang memiliki ijin praktek di bagi dengan jumlah sasaran semua tenaga kesehatan x 100 %	Dinas Kesehatan
9.	Meningkatnya Jumlah Puskesmas Terakreditasi	Status puskesmas terakreditasi -Dasar 4 / 5,9% -Madya 5 / 7,46%	jumlah	Hasil penilaian tim Surveyor yang dibuktikan dengan pemberian sertifikat akreditasi	Dinas Kesehatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
C. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
1.	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai evaluasi SAKIP	Kategori	Nilai Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Daerah	Sekretariat
2.	Menurunnya Angka Kelahiran	Angka Total Fertility Rate (TFR)	%	Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan	Bidang Keluarga Berencana
3.	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Tahapan Keluarga Pra KS berbanding jumlah keluarga	%	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dibagi Jumlah Keluarga x 100	Bidang Keluarga Sejahtera
4.	Tersedianya Data dan Informasi Kependudukan KB dan PPPA	Persentase Kecamatan Yang Mempunyai Data dan Informasi Kependudukan, Keluarga Berencana dan PPPA	%	Jumlah Kecamatan yang mempunyai data dibagi jumlah seluruh kecamatan x 100	Bidang Pengendalian Penduduk
5.	Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	Mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM, yaitu harapan hidup, tingkat pendidikan dan pendapatan namun dengan memperhitungkan ketimpangan gender Indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dimensi dari IDG mencakup partisipasi.	Bidang Perempuan Pemberdayaan Perempuan
6.	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Persentase kepedulian masyarakat terhadap pemenuhan hak anak	%	Jumlah Masyarakat yang memberikan bantuan dibagi Seluruh Jumlah Masyarakat x 100%	Bidang Perlindungan Anak Pemberdayaan Anak

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
D. DINAS SOSIAL					
1.	Meningkatnya pemberdayaan dan akses pelayanan sosial dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase penurunan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) per tahun	%		Dinas Sosial
2.	Meningkatnya kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial potensi sumber kesejahteraan sosial (PMKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta melembaga dan berkelanjutan	Jumlah potensi Sosial yang aktif pelayanan penyelenggara akan kesejahteraan sosial	keluarga	jumlah keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni (RTLH) yang mendapat bantuan rehabilitasi rumah	Dinas Sosial
E. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
1.	Meningkatnya Tenaga Kerja Berkualitas dan Ditempatkan	a. Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan b. Prosentase Tenaga Kerja yang berkualitas c. Prosentase Kenaikan Besaran UMK (Upah Minimum Kabupaten) d. Prosentase Peningkatan Taraf Hidup Transmigran	% % % %	Pencari Kerja yang ditempatkan dibagi Jumlah Pencari Kerja x 100 	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bidang Produktivitas dan Kompetensi Kerja Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
F. DINAS PERTANIAN					
1.	meningkatkan produktivitas pertanian pangan, hortikultura, dan perkebunan	a. produksi padi	ton	jumlah produksi padi dalam setahun	gabah kering giling (gkg)
		b. produksi jagung	ton	jumlah produksi jagung dalam setahun	pipilan kering
		c. produksi kacang tanah	ton	jumlah produksi kacang tanah dalam setahun	biji kering
		d. produksi ubi jalar	ton	jumlah produksi ubi jalar dalam setahun	biji kering
		e. produksi ubi kayu	ton	jumlah produksi ubi kayu dalam setahun	ubi segar/basah
		f. produksi cabai	ton	jumlah produksi cabai besar dalam setahun	sayur segar
		g. produksi bawang merah	ton	jumlah produksi bawang merah dalam setahun	kering panen
		h. produksi kentang	ton	jumlah produksi kentang dalam setahun	sayur segar
		i. produksi sayuran lainnya	ton	jumlah produksi sayuran lainnya dalam setahun	sayur segar
		j. produksi jahe	ton	jumlah produksi jahe dalam setahun	rimpang
		k. produksi kunyit	ton	jumlah produksi kunyit dalam setahun	rimpang
		l. produksi obat lainnya	ton	jumlah produksi obat lainnya dalam setahun	rimpang
		m. produksi jeruk	ton	jumlah produksi jeruk dalam setahun	buah segar
		n. produksi buah lainnya	ton	jumlah produksi buah lainnya dalam setahun	buah segar
		o. produksi sedap malam	tangkai	jumlah produksi sedap malam dalam setahun	bunga segar
		p. produksi tanaman hias lainnya	tangkai	jumlah produksi tanaman hias lainnya dalam setahun	bunga segar

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
		q. produksi kopi	ton	jumlah produksi kopi dalam setahun	biji/ gelondongan
		r. produksi teh	ton	jumlah produksi teh dalam setahun	teh kering
		s. produksi tahunan dan penyegar lainnya	ton	jumlah produksi tahunan dan penyegar lainnya dalam setahun	produk mentah
		t. produksi atsiri	ton	jumlah produksi atsiri dalam setahun	minyak
		u. produksi tanaman semusim dan rempah lainnya	ton	jumlah produksi tembakau dalam setahun	produk mentah
		v. produksi tembakau	ton	jumlah produksi tembakau dalam setahun	mole
2.	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produksi Hasil Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	a. produksi Produk Olahan Hasil Tanaman Pangan	Ton	Jumlah produk olahan hasil Tanaman Pangan dalam setahun	berasan/Produk Olahan
		b. Produksi Produk Olahan Hasil Hortikultura	Ton	Jumlah produk olahan hasil hortikultura dalam setahun	berasan/Produk Olahan
		c. Produksi Produk Olahan Hasil Perkebunan	Ton	Jumlah produk olahan hasil perkebunan dalam setahun	berasan/Produk Olahan
G. DINAS KETAHANAN PANGAN					
1.	meningkatkan ketersediaan pangan, distribusi, stabilitas pasokan dan harga pangan	skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
2.	meningkatkan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan, serta tingkat keamanan pangan	skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan	Bidang Konsumsi dan Pengankaragaman Pangan. Bidang Keamanan Pangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
H. DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN					
1.	meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil perikanan melalui pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan	a. produksi perikanan budidaya	ton	jumlah produksi hasil perikanan budidaya (kolam dan sawah ikan) dalam satu tahun	Bidang Perikanan Budidaya
		b. produksi perikanan tangkap	ton	jumlah produksi perikanan tangkap (laut, sungai, danau/situ) dalam satu tahun	Bidang Perikanan Tangkap
		c. produksi olahan hasil perikanan pada kelompok binaan	ton	jumlah produksi olahan hasil perikanan pda kelompok binaan dalam satu tahun	Bidang Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap
		d. tingkat konsumsi ikan	kg/kapita/tahun	jumlah ikan yang dikonsumsi perkapita pertahun	Bidang Perikanan Budidaya
		e. cakupan bina kelompok nelayan	%	persentase jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemerintah daerah dibanding jumlah seluruh kelompok nelayan	Bidang Perikanan Tangkap
		f. produksi perikanan kelompok nelayan	ton	jumlah produksi ikan yang dihasilkan kelompok nelayan dalam satu tahun	Bidang Perikanan Tangkap
		g. proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	persentase jumlah tangkapan ikan dibandingkan dengan 80% dari tangkapan ikan lestari (msy)	Bidang Perikanan Tangkap
		h. rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	%	luas kawasan lindung perairan dibanding total luas perairan teritorial	Bidang Perikanan Tangkap
		i. nilai tukar nelayan	poin	persentase indeks yang diterima nelayan dibandingkan indeks yang dibayarkan nelayan	Bidang Perikanan Tangkap

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
2.	Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil peternakan berbasis potensi lokal	a. produksi daging	ton	jumlah produksi daging dalam satu tahun	Bidang Peternakan dan Bidang Kesehatan Hewan
		b. produksi telur	ton	jumlah produksi telur dalam satu tahun	Bidang Peternakan dan Bidang Kesehatan Hewan
		c. produksi susu	ribu liter	jumlah produksi susu dalam satu tahun	Bidang Peternakan dan Bidang Kesehatan Hewan
		d. produksi olahan hasil peternakan pada kelompok binaan	ton	jumlah produksi olahan hasil peternakan pada kelompok binaan dalam satu tahun	Bidang Peternakan dan Bidang Kesehatan Hewan
		e. penurunan jumlah kasus penyakit ternak dan peningkatan pengawasan kualitas pangan asal hewan	%	persentasi penurunan jumlah kasus penyakit ternak dan peningkatan jumlah aktivitas pengawasan kualitas pangan asal hewan dalam satu tahun	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
I. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA					
1.	meningkatkan kunjungan wisata	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	jumlah kunjungan wisatawan keseluruhan destinasi wisata di kabupaten garut	Bidang Kepariwisataan dan Bidang Pemasaran
2.	meningkatkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	persentase seni budaya yang dilestarikan dan dikembangkan	%	jumlah seni budaya yang dilestarikan dan dikembangkan dibandingkan dengan jumlah seni dan budaya yang ada di kabupaten garut x 100%	Bidang Kebudayaan dan Bidang Kesenian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
J. DINAS KOPERASI DAN UMKM					
1.	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro	a. jumlah koperasi aktif	jumlah	jumlah seluruh koperasi aktif dalam tahun tertentu	Koperasi dan UMKM
		b. jumlah koperasi sehat	jumlah	jumlah seluruh koperasi sehat dalam tahun tertentu	Koperasi dan UMKM
		c. jumlah koperasi baru	jumlah	jumlah koperasi baru dalam tahun tertentu	Koperasi dan UMKM
		d. jumlah wirausaha baru	orang	jumlah pelaku wirausaha baru dalam tahun tertentu	Koperasi dan UMKM
		e. jumlah usaha mikro yang naik omzetnya	orang	jumlah pelaku usaha mikro dalam tahun tertentu	Koperasi dan UMKM
K. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU					
1.	Meningkatnya laju pertumbuhan investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Laju pertumbuhan investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	%	$\frac{\text{Realisasi PMDN dan PMA}_t - \text{Realisasi PMDN dan PMA}_{t-1}}{\text{Realisasi PMDN dan PMA}_{t-1}}$	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
L. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
1.	Meningkatnya nilai produksi Industri Kecil	Prosentase peningkatan nilai produksi Industri Kecil	%	Nilai produksi tahun n - Nilai produksi tahun n-1 : Nilai Produksi tahun N-1 x 100%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan SDA
2.	Meningkatnya pelaku perdagangan yang terfasilitasi sarana dan prasarananya	Prosentase pelaku perdagangan yang terfasilitasi sarana dan prasarananya	%	Jumlah pelaku perdagangan yang terfasilitasi sarana prasarana : Total jumlah pedagang x 100%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan SDA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
3.	meningkatkan pelaku usaha yang melakukan ekspor	pertumbuhan pelaku usaha yang sudah ekspor	%	Jumlah pelaku usaha tahun n - Jumlah pelaku usaha tahun n-1 : Jumlah pelaku usaha n-1 x 100%	Dinas Perdagangan, Energi dan SDA
4.	meningkatkan rasio elektrifikasi di kabupaten garut	rasio elektrifikasi	%	Jumlah KK yang berlistrik : Jumlah Total KK x 100%	Dinas Perdagangan, Energi dan SDA
5.	meningkatkan kualitas laporan keuangan dan akip yang optimal	nilai hasil evaluasi AKIP	Kategori	Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah	Dinas Perdagangan, Energi dan SDA
M. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan	a. Persentase kemandapan Jalan kabupaten	%	(Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang : Total panjang jalan kabupaten) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		b. Indeks Aksesibilitas	Poin	Panjang Jalan (jalan yang ada dan jalan baru) : Luas Wilayah Kabupaten Garut x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		c. Persentase kemandapan jalan desa	%	(Luas jalan desa yang rusak : Luas Total jalan desa) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Meningkatnya kualitas infrastruktur Permukiman	a. Persentase Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	%	(panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik : Total panjang jalan lingkungan)x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		b. Cakupan air Minum layak	%	Jumlah Jiwa yang terlayani air minum : Jumlah Penduduk x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
		c. Cakupan Sanitasi layak	%	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Sanitasi : Jumlah Total Rumah Tangga x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Air dan Pengendalian Banjir	a. Persentase Luas areal yang terlayani oleh Jaringan irigasi Teknis b. Persentase Luas areal yang terlayani oleh Jaringan irigasi Non Teknis c. Persentase penurunan waktu genangan air diperkotaan d. Persentase penurunan titik rawan banjir e. Persentase tampungan air yang tersedia	%	Luas Areal yang terlayani irigasi teknis : Total Luas Areal yang harus terlayani irigasi non teknis x 100% Luas Areal yang terlayani irigasi non teknis : Total Luas Areal yang harus terlayani irigasi non teknis x 100% Lama Genangan Air Saat Ini : Lama Genangan Air x 100% Jumlah Titik Rawan Banjir saat ini : Jumlah Titik Rawan Banjir x 100% Jumlah Tampungan Air yang tersedia : Target tampungan yang tersedia x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap tata ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	%	(Luas wilayah yang penggunaannya sesuai tata ruang : Total luas wilayah yang seharusnya berdasarkan tata ruang) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	Meningkatnya bangunan gedung	a. Persentase bangunan ber IMB b. Persentase bangunan yang layak teknis	%	Jumlah bangunan Gedung ber IMB : Total Bangunan Gedung x 100% (jumlah bangunan yang layak teknis dan adm : Total bangunan gedung) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
6.	Meningkatnya Penyelenggaraan Jasa Kontruksi	a. Persentase tersedianya layanan Rekomendasi IUJK	%	Jumlah Rckomendasi IUJK yang terbit setelah persyaratan lengkap ; Jumlah Seluruh Permohonan Rekomendasi IUJK yang persyaratannya lengkap x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		b. Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang Terlatih	%	Jumlah Pengguna dan Penyedia Jasa Kontruksi yang terlatih ; Jumlah Pengguna dan Penyedia Jasa Kontruksi x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		c. Persentase Data Kajian Litbang	%	Jumlah Hasil Kajian Litbang : Target Kajian Litbang x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
N. DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN					
1.	Menurunnya Cakupan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	Cakupan Penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan	Ha	Luas Kawasan Kumuh Perkotaan pada Tahun N - 1 dikurangi Luas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan yang tertangani pada tahun N	Dinas Perumahan dan Permukiman
2.	Menurunnya Cakupan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	Cakupan Penurunan Luasan permukiman rawan kumuh Perkotaan	Ha	Luas Kawasan Rawan Kumuh Perkotaan pada Tahun N - 1 dikurangi Luas Kawasan Permukiman Rawan Kumuh yang tertangani pada tahun N	Dinas Perumahan dan Permukiman
3.	Meningkatnya Luas Kawasan Permukiman Perdesaan Yang Berkualitas	Luasan Kawasan permukiman Perdesaan Yang Tertata	Ha	Luas Kawasan Permukiman Perdesaan Yang Tertata pada Tahun N ditambah Luas Kawasan Permukiman Perdesaan Yang Tertata Pada Tahun N-1	Dinas Perumahan dan Permukiman
4.	Menurunnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni	Unit	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni pada tahun N dikurangi Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Direhabilitasi	Dinas Perumahan dan Permukiman

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA																														
O. DINAS LINGKUNGAN HIDUP																																			
1.	Meningkatnya Lingkungan	Kualitas	Poin	<div>$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$</div> <p>Keterangan :</p> <p>Lij = Konsentrasi Baku Peruntukkan Air (j)</p> <p>Ci = Konsentrasi Sampel Parameter Kualitas Air (i)</p> <p>PIj = Indeks Pencemaran Bagi Peruntukkan (j)</p> <p>(Ci/Lij)M = Nilai Maksimum dari Ci/Lij</p> <p>(Ci/Lij)R = Nilai Rata-rata dari Ci/Lij</p> <table><tr><th>Status</th><th>Jumlah</th><th>Persen</th><th>Koefisien</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>Memenuhi</td><td>Jumlah Sampel Kriteria Memenuhi Status Mutu Air</td><td>•Jumlah Sampel Kriteria Memenuhi/Jumlah Seluruh Sampel x 100%</td><td>70</td><td>•Persen x Koefisien</td></tr><tr><td>Ringan</td><td>Jumlah Sampel Kriteria Cemar Ringan</td><td>•Jumlah Sampel Kriteria Cemar Ringan/Jumlah Seluruh Sampel x 100%</td><td>50</td><td>•Persen x Koefisien</td></tr><tr><td>Sedang</td><td>Jumlah Sampel Kriteria Cemar Sedang</td><td>•Jumlah Sampel Kriteria Cemar Sedang/Jumlah Seluruh Sampel x 100%</td><td>30</td><td>•Persen x Koefisien</td></tr><tr><td>Berat</td><td>Jumlah Sampel Kriteria Cemar Berat</td><td>•Jumlah Sampel Kriteria Cemar Berat/Jumlah Seluruh Sampel x 100%</td><td>10</td><td>•Persen x Koefisien</td></tr><tr><td colspan="4">Nilai Indeks Pencemaran Air</td><td>Jumlah Nilai</td></tr></table>	Status	Jumlah	Persen	Koefisien	Nilai	Memenuhi	Jumlah Sampel Kriteria Memenuhi Status Mutu Air	•Jumlah Sampel Kriteria Memenuhi/Jumlah Seluruh Sampel x 100%	70	•Persen x Koefisien	Ringan	Jumlah Sampel Kriteria Cemar Ringan	•Jumlah Sampel Kriteria Cemar Ringan/Jumlah Seluruh Sampel x 100%	50	•Persen x Koefisien	Sedang	Jumlah Sampel Kriteria Cemar Sedang	•Jumlah Sampel Kriteria Cemar Sedang/Jumlah Seluruh Sampel x 100%	30	•Persen x Koefisien	Berat	Jumlah Sampel Kriteria Cemar Berat	•Jumlah Sampel Kriteria Cemar Berat/Jumlah Seluruh Sampel x 100%	10	•Persen x Koefisien	Nilai Indeks Pencemaran Air				Jumlah Nilai	Dinas Lingkungan Hidup
Status	Jumlah	Persen	Koefisien	Nilai																															
Memenuhi	Jumlah Sampel Kriteria Memenuhi Status Mutu Air	•Jumlah Sampel Kriteria Memenuhi/Jumlah Seluruh Sampel x 100%	70	•Persen x Koefisien																															
Ringan	Jumlah Sampel Kriteria Cemar Ringan	•Jumlah Sampel Kriteria Cemar Ringan/Jumlah Seluruh Sampel x 100%	50	•Persen x Koefisien																															
Sedang	Jumlah Sampel Kriteria Cemar Sedang	•Jumlah Sampel Kriteria Cemar Sedang/Jumlah Seluruh Sampel x 100%	30	•Persen x Koefisien																															
Berat	Jumlah Sampel Kriteria Cemar Berat	•Jumlah Sampel Kriteria Cemar Berat/Jumlah Seluruh Sampel x 100%	10	•Persen x Koefisien																															
Nilai Indeks Pencemaran Air				Jumlah Nilai																															

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA																				
		b. Indeks Kualitas Udara	poin	<p>1. Menghitung Indeks Pencemaran Udara</p> $IPU = \frac{IPNO_2 + IPSO_2}{2}$ <p>Dimana :</p> <p>IPU = Indeks Pencemaran Udara</p> <p>IPNO₂ = Indeks Pencemar NO₂</p> <p>IPSO₂ = Indeks Pencemar SO₂</p> <p>2. Menghitung Indeks Udara IKLH</p> $Index\ Udara\ IKLH = 100 - \left(\frac{50}{0.9} \times (I_{eu} - 0.1) \right)$ <p>Dimana :</p> <p>EU = Referensi</p> <p>I_{eu} = Indeks Udara Model EU</p> <table><tr><th>Parameter</th><th>Rerata</th><th>EU</th><th>I_{eu}</th></tr><tr><td>NO₂</td><td>= (Jumlah Nilai Pengukuran NO₂ Semua Titik Pantau/ Jumlah Semua Titik Pantau)</td><td>40</td><td>= Rerata/ EU</td></tr><tr><td>SO₂</td><td>= (Jumlah Nilai Pengukuran SO₂ Semua Titik Pantau/ Jumlah Semua Titik Pantau)</td><td>20</td><td>= Rerata/ EU</td></tr><tr><td colspan="2">Rata-rata</td><td></td><td>= Rata-rata Nilai I_{eu}</td></tr><tr><td colspan="2">Indeks Udara</td><td></td><td>Rumus Indeks Udara IKLH</td></tr></table>	Parameter	Rerata	EU	I _{eu}	NO ₂	= (Jumlah Nilai Pengukuran NO ₂ Semua Titik Pantau/ Jumlah Semua Titik Pantau)	40	= Rerata/ EU	SO ₂	= (Jumlah Nilai Pengukuran SO ₂ Semua Titik Pantau/ Jumlah Semua Titik Pantau)	20	= Rerata/ EU	Rata-rata			= Rata-rata Nilai I _{eu}	Indeks Udara			Rumus Indeks Udara IKLH	Dinas Lingkungan Hidup
Parameter	Rerata	EU	I _{eu}																						
NO ₂	= (Jumlah Nilai Pengukuran NO ₂ Semua Titik Pantau/ Jumlah Semua Titik Pantau)	40	= Rerata/ EU																						
SO ₂	= (Jumlah Nilai Pengukuran SO ₂ Semua Titik Pantau/ Jumlah Semua Titik Pantau)	20	= Rerata/ EU																						
Rata-rata			= Rata-rata Nilai I _{eu}																						
Indeks Udara			Rumus Indeks Udara IKLH																						

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
		c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	poin	<p>Konversi persentase yang merupakan perbandingan luas tutupan lahan dengan luas wilayah kabupaten</p> <p>1. Menghitung Persentase Tutupan Lahan/Hutan :</p> $TH = \frac{LTH}{LWK} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>TH : Tutupan Lahan/Hutan</p> <p>LTH : Luas Tutupan Lahan Berhutan</p> <p>LWK : Luas Wilayah Kabupaten</p> <p>2. Menghitung Nilai Indeks Tutupan Lahan/Hutan:</p> $ITH = 100 - \left((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$	Dinas Lingkungan Hidup
		Tingkat Pengelolaan Sampah	%	(Jumlah: Sampah Terkelola/Jumlah Sampah Total Adminlstratif) x 100%	Dinas Lingkungan Hidup

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
P. DINAS PERHUBUNGAN					
1.	meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat pemilik angkutan umum & kendaraan uji di Kabupaten Garut	a. Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan b. Persentase titik kemacetan yang teraturasi c. Persentase kapal nelayan yang laik layar	% % %	(Jumlah kendaraan yang duji pada tahun n dibagi jumlah kendaraan pada tahun n-1) X 100% Jumlah lokasi titik rawan kemacetan yang teraturasi pada tahun pengukuran di bagi target lokasi titik rawan kemacetan X 100 (%) Jumlah kapal nelayan <7 GT yang laik layar (tersertifikasi) di bagi jumlah seluruh kapal <7GT yang terdata di kali 100%	Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
2.	meningkatkan ketertiban dan keselamatan masyarakat dalam berlalu lintas	persentase menurunnya pelanggaran lalu lintas	%	jumlah angka pelanggaran lalu lintas pada tahun pengukuran di bagi target x 100%	Dinas Perhubungan
Q. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					
1	meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	indeks kapasitas penanggulangan bencana	Poin	Penilaian tingkat kemampuan berdasarkan 7 parameter kapasitas, regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2	menurunnya kerentanan terhadap bencana	indeks kerentanan bencana	Poin	Penilaian berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan	Bidang Kedarutan dan Logistik, dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
R. DINAS PEMADAM KEBAKARAN					
1	peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan	Persentase kualitas penanganan kebakaran, Pencegahan dan operasi Penyelamatan	%	Jumlah layanan pemadaman dan penyelamatan yang dilakukan oleh pemadam kebakaran dan relawan kebakaran dalam tingkat waktu tanggap (response time): Jumlah kejadian kebakaran di kota/kabupaten di tahun x 100%	Dinas Pemadam Kebakaran
S. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
1.	terselenggaranya pemerintah berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	%	(Jumlah Jawaban x Bobot) : Jumlah Pertanyaan X 100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Kecamatan	Presentase Akses Komunikasi dan Informasi Publik di Kabupaten Garut	%	(Komponen Informasi publik+Komunikasi publik)/2 x 100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
T. INSPEKTORAT DAERAH					
1.	meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Garut	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK – RI dan Pengawasan APIP	%	(Jumlah SKPD yang telah melakukan rekomendasi LHP BPK-RI di bagi jumlah SKPD mendapatkan rekomendasi temuan BPK-RI) dikali 100% (Jumlah SKPD yang telah melakukan rekomendasi LHP APIP di bagi jumlah SKPD mendapatkan rekomendasi temuan APIP) dikali 100%	SKPD yang telah melakukan rekomendasi hasil pemeriksaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
		Persentase SKPD Nilai SAKIP "A"	%	(Jumlah SKPD Nilai SAKIP A dibagi Jumlah Seluruh SKPD yang di Evaluasi) dikali 100%	SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP A
		Persentase Obyek Pemeriksaan tanpa temuan bersifat materil pada pemeriksaan regular	%	(Jumlah Obrik tanpa temuan materil pada tahun n dibagi Jumlah Seluruh Obrik pada pemeriksaan regular tahun n) dikali 100%	Jumlah obrik yang didapati adanya temuan yang bersifat materil
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	%	(Jumlah Pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dibagi Jumlah seluruh pengaduan yang masuk) dikali 100%	Pengaduan masyarakat yang diterima Inspektorat Daerah
		Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP level terdefinisi (Self Assesment)	%	(Jumlah SKPD yang telah menerapkan SPIP level terdefinisi (Self Assesment) s.d tahun n dibagi Jumlah target SKPD (35 SKPD)) dikali	SKPD yang telah menerapkan SPIP Level Terdefinisi
2.	terciptanya pemerintahan daerah yang bersih berintegritas tanpa tindak pidana korupsi	a. Persentase MCP (Monitoring Center of Prevention) Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi) b. Jumlah SKPD/Unit Kerja yang berpredikat ZI WBK WBBM dari TPN (Tim Penilai Nasional)	% unit kerja	Hasil Penilaian melalui Sistem MCP KPK Hasil Penilaian Tim Penilai Nasional Kemenpan RB	Pemenuhan indikator kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi SKPD/Unit Kerja yang difasilitasi dalam penilaian ZI WBK dan WBBM tingkat nasional
3.	meningkatkan kompetensi aparatur pengawasan yang berkualitas dan handal	Tingkat Kapabilitas APIP	level	Hasil Quality Assurance BPKP RI	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
4.	meningkatkan kepuasan auditee dan aparatur	Indeks Persepsi Auditee dan Aparatur	indeks	Hasil Penilaian Mandiri Kepuasan Aparatur melalui Survei terhadap Auditee	Hasil survei
U. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
1.	terwujudnya perencanaan pembangunan daerah	a. tingkat keselarasan terhadap RPJMD	%	<p>Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD - $(Ki_1 + Ki_2 + Ki_3 + Ki_4 + Ki_5 + Ki_6) / 6$</p> <p>$Ki_1 = \frac{\text{Jumlah Sasaran pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Sasaran pada RPJMD}} \times 100\%$</p> <p>$Ki_2 = \frac{\text{Jumlah Indikator Sasaran pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Indikator Sasaran pada RPJMD}} \times 100\%$</p> <p>$Ki_3 = \frac{\text{Jumlah Target Sasaran pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Target Sasaran pada RPJMD}} \times 100\%$</p> <p>$Ki_4 = \frac{\text{Jumlah Program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Program pada RPJMD}} \times 100\%$</p>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
				<div>Jumlah Target Sasaran pada RPJMD</div> <div>$Ki_a = \frac{\text{Jumlah Program pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Program pada RPJMD}} \times 100\%$</div> <div>$Ki_b = \frac{\text{Jumlah Indikator Program pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Indikator Program pada RPJMD}} \times 100\%$</div> <div>$Ki_c = \frac{\text{Jumlah Target Program pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Target Program pada RPJMD}} \times 100\%$</div>	
	c. Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD			<div>Tingkat Keselarasan Renja terhadap RKPD</div> <div>$= (Ki_1 + Ki_2 + Ki_3 + Ki_4 + Ki_5 + Ki_6) / 6$</div> <div>$Ki_i = \frac{\text{Jumlah Program pada Renja yang sesuai dengan RKPD}}{\text{Jumlah Program pada RKPD}} \times 100\%$</div> <div>$Ki_c = \frac{\text{Jumlah Indikator Program pada Renstra yang sesuai}}{\text{Jumlah Indikator Program pada Renstra yang sesuai}} \times 100$</div>	Badan Pembangunan Daerah Perencanaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
				<div> <div>= Indikator Program dengan RKPD</div> <div>%</div> <div>Jumlah Indikator Program pada RKPD</div> </div> <div> <div>Jumlah Target Program pada RKPD yang sesuai dengan Renja</div> <div>$\times 100\%$</div> <div>Keselarasan Target Program =</div> <div>Jumlah Target Program pada RPJMD</div> </div> <div> <div>Jumlah Kegiatan pada Renja yang sesuai dengan RKPD</div> <div>$\times 100\%$</div> <div>Keselarasan Kegiatan =</div> <div>Jumlah Kegiatan pada RKPD</div> </div>	
				<div> <div>Jumlah Indikator Kegiatan pada Renja yang sesuai dengan RKPD</div> <div>$\times 100\%$</div> <div>Keselarasan Indikator Kegiatan =</div> <div>Jumlah Indikator Kegiatan pada RKPD</div> </div> <div> <div>Jumlah Target Kegiatan pada Renja yang sesuai dengan RKPD</div> <div>$\times 100\%$</div> <div>Keselarasan Target Kegiatan =</div> <div>Jumlah Target Kegiatan pada RKPD</div> </div>	
				<div> <div>(Jumlah usulan aspiratif dan teknokratif yang ada dalam dokumen perencanaan dibagi Jumlah total usulan aspiratif dan teknokratif)x100%</div> </div>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
2.	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi serta hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase hasil kajian dokumen penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan	%	(Jumlah dokumen hasil kajian penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti/disepakati dilaksanakan dibagi Jumlah dokumen hasil kajian penelitian dan pengembangan yang telah disusun)x100%	Badan Pembangunan Daerah
		b. Persentase integrasi data capaian kinerja dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah		(Jumlah data kinerja yang terisi dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah dibagi Jumlah data kinerja yang harus diisi dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah)x100%	Badan Pembangunan Daerah
3.	Meningkatnya capaian kinerja pelaksanaan Program pembangunan daerah	a. Persentase pencapaian kinerja RPJMD	%	(Indikator dalam RPJMD yang mencapai/melebihi target dibagi Jumlah total indikator dalam RPJMD)x100%	Badan Pembangunan Daerah
		b. Persentase capaian kinerja Program pembangunan		(Jumlah Program yang dilaksanakan oleh SKPD dibagi Jumlah Program yang direncanakan dalam RKPD)x 100%	Badan Pembangunan Daerah
4.	Meningkatnya akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Nilai evaluasi SAKIP Kabupaten	Kategori	Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Badan Pembangunan Daerah
		b. Nilai evaluasi SAKIP Badan Pembangunan Daerah	Kategori	Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Badan Pembangunan Daerah
		c. Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	%	(Temuan BPK/Inspektorat Daerah yang ditindaklanjuti dibagi Seluruh jumlah temuan BPK/Inspektorat Daerah pada tahun berjalan)x100%	Badan Pembangunan Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
V. SEKRETARIAT DAERAH					
1.	Meningkatnya Kelola/Sistem Pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan	Tata Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kecamatan	Nilai LPPD	Nilai LPPD merupakan Indeks Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD) Tim Evaluasi atas LPPD tahun sebelumnya, yang dinilai berdasarkan Indeks Komposit dari dua variabel utama, yakni Indeks Capaian Kinerja (ICK) sesuai Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EKPPD dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKpj Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD Kepada Masyarakat	Sekretariat Daerah
2.	Meningkatnya Kelola/Sistem Pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan	Tata Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kecamatan	Persentase Kecamatan Berkinerja Baik	% (Jumlah Kecamatan Berkinerja Baik dibagi dengan Jumlah Kecamatan Yang ada di kabuoaten Garut) x 100%	Bagian Tata Pemerintahan
3.	Meningkatnya Kelola/Sistem Pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan	Tata Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kecamatan	Persentase kasus pertanahan yang difasilitasi	% (Jumlah Kasus Pertanahan yang terinventarisir pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah kasus yang ditangani) X 100%	Bagian Tata Pemerintahan
4.	Terpenuhinya Kebijakan Publik Daerah, Publikasi Produk Hukum dan Penanganan Permasalahan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kebutuhan Publik Daerah, Publikasi Produk Hukum dan Penanganan Permasalahan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	% (Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan di bagi dengan produk hukum yang diusulkan) X 100%	Bagian Hukum dan HAM
5.	Meningkatnya Pelayanan Publik	Kualitas Pelayanan Publik	Persentase SKPD yang melaksanakan survey Kepuasan Pelanggan	% (Jumlah SKPD yang melaksanakan survey kepuasan pelanggan dibagi jumlah SKPD yang ada di Kabupaten Garut) X 100%	Bagian Organisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
6.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pembangunan	Persentase paket pengadaan yang dilaksanakan melalui ULP	%	(Jumlah Paket Pengadaan yang dilaksanakan melalui ULP dibagi dengan jumlah paket yang ada dalam SIRUP) X 100%	<ul style="list-style-type: none"> Bagian Bagian Pengendalian Pembangunan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
W. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH					
1	meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka kegiatan memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota dprd	Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Garut terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dibanding jumlah anggota DPRD	%	(Jumlah Dewan yang puas : Jumlah Anggota DPRD) X 100%	Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Penyelenggaraan administrasi keuangan
X. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
1.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Tertib, Akuntabel dan Transparan	a. Persentase SKPD yang menyelesaikan Anggaran Tepat Waktu dan Sesuai SOP b. Persentase Penyerapan Keuangan Sesuai Target c. Persentase Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	%	(Jumlah SKPD dengan penyelesaian perencanaan anggaran tepat waktu dan sesuai SOP dibanding jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut) x 100 % (Realisasi Belanja Daerah / Total Belanja Daerah) x100% Waktu Penetapan Pertanggungjawaban APBD ≤ BatasWaktu Penetapan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen perencanaan APBD dan APBD Perubahan Laporan Realisasi Keuangan Persetujuan DPRD Terhadap RAPERDA Pertanggung jawaban yang telah Diaudit BPK
2.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Tertib, Akuntabel dan Transparan	Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir	%	(Data Aset di Lapangan / Data Inventaris Barang) x100%	Laporan Barang Milik Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
Y. BADAN PENDAPATAN DAERAH					
1	meningkatkan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah	laju pertumbuhan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah	%	Persentase jumlah kenaikan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	Bidang Pendataan dan Penetapan Bidang Penagihan Bidang Pengembangan dan Kerjasama dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan
2	meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah	a. Nilai hasil evaluasi SAKIP b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	kategori kategori	Kategori BB penilaian SAKIP Badan Pendapatan Daerah Kategori Baik penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	Sekretariat Bidang Pendataan dan Penetapan Bidang Penagihan
Z. BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT					
1	Penguatan Sistem Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit	a. Persentase terpenuhinya peningkatan kompetensi PNS b. Persentase penempatan ASN Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi dan Kompetensi c. Persentase terpenuhinya formasi aparatur sesuai dengan Anjab dan ABK d. Persentase Data Pegawai yang di perbaharui tepat waktu e. Persentase Tingkat Disiplin ASN	% % % % %	(Σ Pemenuhan Pengembangan Kompetensi : Σ Kebutuhan berdasar TNA X 100%) Σ Jabatan yang Telah Diisi Sesuai Kompetensi : Jumlah Total Jabatan X 100% Σ Pengadaan ASN : Σ Kebutuhan yang Telah Ditetapkan X 100% Σ Data Pegawai yang telah diperbaharui: Σ Pegawai X 100% Σ Pegawai yang Tidak Melanggar Disiplin : Σ Pegawai X 100%	Badan Kepegawaian dan Diklat Badan Kepegawaian dan Diklat Badan Kepegawaian dan Diklat Badan Kepegawaian dan Diklat Badan Kepegawaian dan Diklat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
		f. Persentase PNS yang Mencapai Prestasi Kerja>80	%	Σ Pegawai dengan Nilai Prestasi Kerja > 80 ; Σ Pegawai X 100%	Badan Kepegawaian dan Diklat
AA.BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
1.	terwujudnya kebebasan civil	a. tingkat kebebasan berkeyakinan	%	Jumlah Potensi Konflik Keagamaan dikurangi Konflik Keagamaan dibagi Potensi Konflik Keagamaan x 100%	Badan Ketahanan Bangsa dan Politik
		b. tingkat kebebasan berkumpul berseikat	%	Jumlah Potensi Konflik Orkemas dikurangi Jumlah Konflik Orkemas dibagi Jumlah Potensi Konflik Orkemas x 100%	Badan Ketahanan Bangsa dan Politik
2.	terwujudnya hak-hak politik masyarakat	a. Tingkat Kebebasan Berpendapat	%	Jumlah Unras dikurangi Unras anarkis dibagi jumlah unras x 100%	Badan Ketahanan Bangsa dan Politik
		b. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Politik	%	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Badan Ketahanan Bangsa dan Politik
3.	Meningkatnya Bakesbangpol	Kapasitas Aparatur Bakesbangpol	%	proentase pemenuhan kebutuhan pelayanan	Badan Ketahanan Bangsa dan Politik
BB.DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
1.	meningkatnya kualitas pemerintahan desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	Jumlah desa berkinerja baik dibagi keseluruhan jumlah desa se-kabupaten Garut kali 100 %	Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Desa
2.	meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa	a. Persentase Kontribusi Swadaya Murni Masyarakat dalam membangun kewilayahan b. Prosentase LPM desa yang aktif	% %	jumlah swadaya murni masyarakat yang tertera di APBDes di bagi jumlah keseluruhan APBDes di kali 100 % Jumlah LPM yang Aktif dibagi dengan jumlah keseluruhan desa dikali 100%	Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Desa

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
		c. Prosentase kader posyandu aktif	%	jumlah kader posyandu aktif dibagi jumlah keseluruhan kader posyandu dikali 100%	Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Desa
3.	meningkatkan kelembagaan kelompok usaha ekonomi perdesaan	a. prosentase kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat yang aktif	%	Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi produktif yang ada di Desa dibagi jumlah keseluruhan desa dikali 100%	Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Desa
		b. Prosentase Desa memiliki BUMDes	%	Jumlah desa yang sudah memiliki BUMDES dibagi jumlah keseluruhan desa dikali 100%	Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Desa
		c. prosentase pasar desa terfasilitasi	%	Jumlah pasar desa yang baik dan aktif di bagi jumlah keseluruhan pasar desa kali 100 %	Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Desa
4.	meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	a. Cakupan kinerja persentase rata-rata nilai SKP diatas 75	%	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang dapat nilai SKP >75 : Jumlah Seluruh Aparatur Sipil Negara x 100%	Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Desa
		b. Nilai evaluasi SAKIP	Kategori	Hasil Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
CC. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH					
1	Meningkatnya pembudayaan kegemaran membaca dan kecerdasan (literasi) masyarakat	Prosentase pemustaka dalam satu tahun	%	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah : Jumlah Penduduk (usia 5 - 59 Th) X 100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Meningkatnya penerapan standar baku Kearsipan	Prosentase perangkat daerah yang menerapkan standar baku kearsipan	%	Jumlah Perangkat Daerah yang tertib arsip : Jumlah Perangkat Daerah X 100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
DD. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL					
1	Meningkatnya Penataan dan Penertiban dalam Penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan	a. Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	Jumlah Penduduk Usia >17 yang ber KTP dibagi Jumlah Penduduk Usia > 17 atau telah menikah x 100%	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		b. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	%	Jumlah KTP-el yang diterbitkan dibagi jumlah Permohonan Penerbitan KTP x 100%	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		c. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	%	Jumlah Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan penerbitan kartu tanda penduduk x 100%	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		d. Rasio Bayi berakte kelahiran	%	Jumlah Bayi berakte kelahiran dibagi Jumlah Bayi x 100%	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
		e. Rasio Pasangan Berakte Nikah	%	Jumlah Pasangan Nikah Berakte Nikah dibagi Jumlah Keseluruhan Pasangan Nikah x 100%	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
		f. Cakupan Penerbitan Akta kelahiran	%	Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan dibagi jumlah Permohonan Penerbitan Akta Kelahiran x 100%	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
		g. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Jumlah	Ada/Tidak Ada	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
EE. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
1	Meningkatnya Keterlibatan Umum, Ketertarikan dan Perlindungan Masyarakat	a. Persentase Pelanggaran PERDA	%	Jumlah Pelanggaran Tahun N -1 dikurangi Jumlah Pelanggaran Tahun N dibagi Jumlah Pelanggaran Tahun N -1 X 100%	Satuan polisi pamong praja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
		b. Prosentase Gangguan Tibum Tranmas	%	Jumlah Gangguan Tibum Tranmas yang ditangani dibagi Jumlah Gangguan X 100%	Satuan polisi pamong praja
		c. Rasio Linmas / 10 Ribu Penduduk	%	Jumlah Linmas dibagi Jumlah Penduduk X 10.000	Satuan polisi pamong praja
		d. Prosentase Aparatur Satpol dan Linmas yang memenuhi standar kualifikasi	%	Jumlah Aparatur Satpol dan Linmas yang memiliki sertifikat sesuai Kualifikasi dibagi Jumlah Seluruh Pegawai Satpol dan Linmas X 100%	Satuan polisi pamong praja
FF.DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA					
1.	Meningkatnya Harapan Hidup Masyarakat	a. Persentase Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah	%	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan kepemudaan : Jumlah Pemuda di Kabupaten Garut x 100%	Dinas Pemuda dan Olahraga
		b. Persentase Nomor Cabang Olahraga Pelajar yang meraih Medali dalam Kompetisi Tingkat Jawa Barat dan Nasional	%	Jumlah Pelajar yang meraih Medali : Jumlah Seluruh Pelajar yang mengikuti Kompetisi x 100%	Dinas Pemuda dan Olahraga
		c. Persentase Kecamatan yang melaksanakan Olahraga secara rutin	%	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Olahraga Masyarakat : Jumlah Kecamatan di Kabupaten Garut x 100%	Dinas Pemuda dan Olahraga
		d. Persentase Kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana pemuda	%	Jumlah Kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana : Jumlah Kecamatan di Kabupaten Garut x 100%	Dinas Pemuda dan Olahraga
		e. Persentase Desa yang memiliki sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	%	Jumlah Desa yang memiliki sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik : Jumlah Desa di Kabupaten Garut x 100%	Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
GG. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT					
1	Meningkatnya kualitas pelayanan bagi masyarakat di Kabupaten Garut	a. kemampuan menangani live saving anak dan dewasa	%	Jumlah pasien yang datang di bagi jumlah pasien yang dilayani x 100%	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut
		b. dokter pemberi pelayanan di poliklinik spesialis	%	Jumlah pasien yang datang ke poliklinik dibagi jumlah pasien yang dilayani oleh spesialis x 100%	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut
		c. ketersediaan pelayanan rawat inap	Ya/Tidak	Adanya pelayanan anak, penyakit dalam, kebidanan dan bedah	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut
		d. waktu tunggu operasi elektif	hari	Jumlah pasien yang dioperasi kurang dari 2	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut
		e. pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Orang	Jumlah Tim Ponek yang terlatih dan memiliki sertifikat	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut
		f. pemberi pelayanan unit intensif	Ya/Tidak	Pemberi pelayanan unit intensif oleh Dokter Sp.OC, Dokter Umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal) dan - Bidan	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut
		g. Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Thorax Photo	Jam	Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Thorax Photo	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut
		h. Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Laboratorium	Menit	Waktu tunggu pelayanan laboratoriumkurang dari 140 menit	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut
		i. Kejadian DO pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik	%	Jumlah pasien rehabilitasi medik yang dilayani dibagi jumlah pasien rehabilitasi medik yang direncanakan di kali 100	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
		j. Penulisan Resep sesuai formularium	%	Jumlah pasien yang diberikan obat sesuai formularium dibagi jumlah obat formularium dikali 100	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut
		k. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	%	Hasil nilai kesesuaian pemberian diet dibagi daftar pemesanan makanan pasien di kali	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut
		l. Pelayanan terhadap pasien gakin yang datang ke RS pada unit pelayanan	%	Jumlah pasie gakin yang datang dibagi jumlah kunjungan pasien gakin dikali 100	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut
		m. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	%	Jumlah rekam medik yang dikembalikan dengan lengkap 24 jam dibagi jumlah rekam medik yang kembali lebih dari 24 jam di kali 100	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut
		n. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	%	Jumlah hasil pertemuan direksi yang ditindak lanjuti dibagi jumlah pertemuan direksi di kali 100	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut
		o. Cost Recovery	%	Jumlah nilai belanja dibagi jumlah nilai pendapatan di kali 100	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut
		p. Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah	jam	Pelayanan ambulance/kereta jenazah 24 jam	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut
		q. Peralatan Lab dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	%	Jumlah alat lab dan alat ukur yang terkalibrasi tepat waktu dibagi jumlah alat yang ada di kali 100%	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut
		r. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	%	Jumlah linen yang di sediakan tepat waktu di bagi jumlah ruang rawat inap di kali 100	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut
		s. Anggota tim PPI yang terlatih	%	Jumlah anggota PPI yang terlatih dibagi jumlah semua anggota Tim PPI dikali 100	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut
		t. Kepuasan Pelanggan	%	Hasil survei Kepuasan Masyarakat	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
HH. KECAMATAN GARUT KOTA					
1.	Meningkatnya Ketepatan Waktu pelayanan	Indek kepuasan masyarakat (IKM) dalam pelayanan masyarakat	%	Hasil survey kepuasan masyarakat (Permenpan RB 16/2014 dan SK Menpen No 25 / 2004 S)	Kecamatan Garut Kota
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan /Desa/Kelurahan	Persentase pelayanan yang dapat ditindak lanjuti Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang ber kriteria baik	% %	(persentasi pelayanan yang dilayani dibagi jumlah seluruh pelayanan yang belum dibayar)x 100% Perbandingan antar jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi Lembaga Kemasyarakatan Se-Kecamatan Garut Kota X 100 %	Kecamatan Garut Kota Kecamatan Garut Kota
II. KECAMATAN TAROGONG KIDUL					
1.	Meningkatnya pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Hasil survey kepuasan masyarakat (Permenpan RB 16/2014 dan SK Menpen No 25 / 2004 S)	Kecamatan Tarogong Kidul
2.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan Desa/ kelurahan	Persentase Desa /Kelurahan yang berkinerja baik	%	Jumlah Desa/Kelurahan yang berkinerja baik dibagi Jumlah Seluruh Desa/Kelurahan x 100%	Kecamatan Tarogong Kidul

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN